

ANALISIS KELOMPOK NELAYAN DI KECAMATAN TOBELO, KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Fishermen Group Analysis In Tobelo Sub-district of North Halmahera North Mollucas Province

Nyoter JC Koenoe¹, Domu Simbolon², John Haluan²

Abstract

Tobelo as a center of government and economy, has the potential and trigger growth for the development of civil society groups, especially groups of fishermen in North Halmahera. This is the main attraction of researchers to examine or investigate the phenomenon. This study aims to: 1) identify the characteristics and the role of fishermen's groups, 2) evaluate the potential and problems of fishermen and 3) formulate strategies to strength institutional group of fishermen. This research was conducted from June to November of 2009 in Tobelo North Halmahera District. This research was conducted with a participatory approach using Focus Groups Discussion (FGD) with 3 groups of fishermen: Karunia, Nustalenta, and Emmanuel. Three groups were purposively selected thought purposive sampling. Based arsip groups and FGD results obtained information that the characteristics of groups of fishermen in the district of Tobelo strongly influenced by socio-economic conditions of society. Groups of fishermen in the district of Tobelo have a role in various spheres of life scale, although still a member of the group and has not been formally institutionalized. Roles include economic, social, religious, political, security and technical education. Groups of fishermen in the district of Tobelo had 10 and 15 potential issues that reflect the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the group. The high motivation and work ethic administrators group into power factor with the most potential for increasing productivity of the group and supported by a number of opportunities for programs based on institutional empowerment. Problem of lack of knowledge and organizational skills a factor weaknesses that greatly affect the sustainability of the group and obscurity rules fishing gear and fishing areas that can pose a threat down passion and productivity of fishermen in the district of Tobelo. The strength effort and increased productivity of fishermen in the district of Tobelo group there are 12 alternative strategies. There are four priority strategies to be implemented, including: improved communication systems, means of groups working paper, documentation and publishing and making the group a legal entity.

Key words: Fishermen, Tobelo, role, potential, problems, productivity.

¹ Lulusan program magister sains Mayor Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap, Sekolah Pascasarjana IPB

² Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Tobelo merupakan kecamatan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Berbagai aktivitas ekonomi tumbuh dengan subur melebihi kecamatan lain, salah satunya adalah perikanan tangkap. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah alat tangkap dari tahun 2005 s/d 2007 sebesar $\pm 5,2\%$ dan peningkatan hasil tangkapan $3,7\%$, relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lain (DKP, 2008). Namun besarnya peningkatan tersebut belum bisa menghapus stigma masyarakat nelayan sebagai masyarakat miskin atau masyarakat golongan bawah.

Masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah 1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan 6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2009).

Berlembaga atau berkelompok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi maupun status sosial. Menurut Kusnadi (2009) berlembaga atau berorganisasi dapat 1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat, 2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi dan kebijakan, 3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan 4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan kajian tentang kelembagaan nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo. Tujuan penelitian ini adalah 1) menentukan peranan kelembagaan nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo, 2) mengidentifikasi potensi dan permasalahan kelembagaan nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo dan 3) merumuskan strategi pengembangan kelembagaan nelayan tangkap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat khususnya anggota dan pengurus lembaga nelayan tangkap serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kecamatan maupun kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat.

2 METODE PENELITIAN

2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Juli 2010 di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan (bulan Juni s/d Juli). Lokasi pengambilan data dilakukan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Pengambilan data difokuskan pada lembaga atau kelompok nelayan tangkap di kecamatan tersebut.

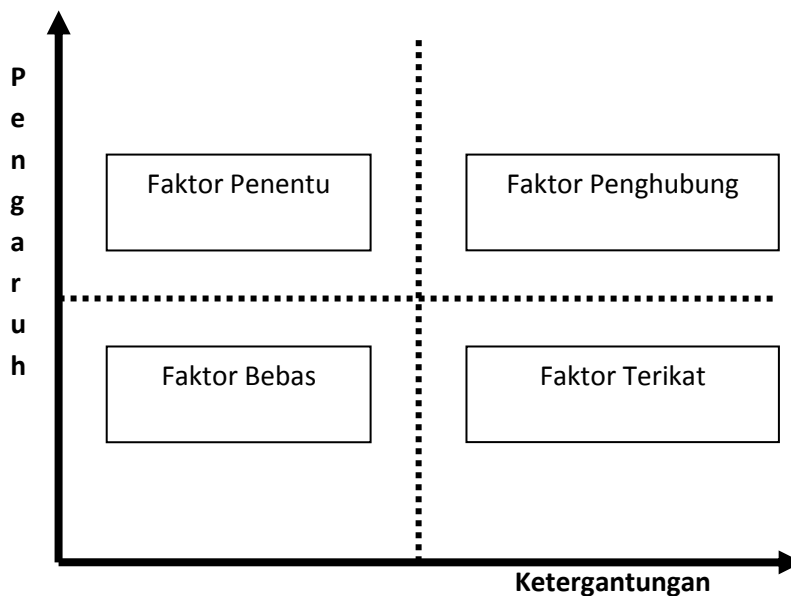
2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *focus groups discussion* (FGD) dengan pengurus dan anggota lembaga atau kelompok. Data primer yang dikumpulkan meliputi 1) peranan lembaga atau kelompok; 2) potensi dan permasalahan lembaga; 3) alternatif strategi pengembangan lembaga kedepan. Data diperoleh dari kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Tobelo, meliputi 17 kelompok yang tersebar pada 7 desa. Untuk kepentingan penelitian ditentukan 3 (tiga) kelompok nelayan sebagai sampel untuk mewakili Kecamatan Tobelo. Pemilihan sampel kelompok nelayan ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling method*). Adapun ketiga kelompok nelayan sampel yang dimaksud adalah 1) Kelompok Karunia, 2) Kelompok Nustalenta, dan 3) Kelompok Imanuel.

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi: data demografi kecamatan dan kabupaten serta data perikanan. Data tersebut diperoleh melalui studi literatur dan penelusuran data pada instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Camat Tobelo.

2.3 Analisis Data

Analisis data meliputi 1) analisis peranan dan kondisi lembaga dianalisis secara diskriptif, dan 2) alternatif strategi pengembangan lembaga dianalisis secara partisipatif dengan metode internal faktor strategi (IFAS) dan untuk mendapatkan prioritas strategi dilakukan analisis dengan metode *prospective participation analysis* (PPA). Sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Pemetaan strategi dalam penentuan prioritas strategi PPA

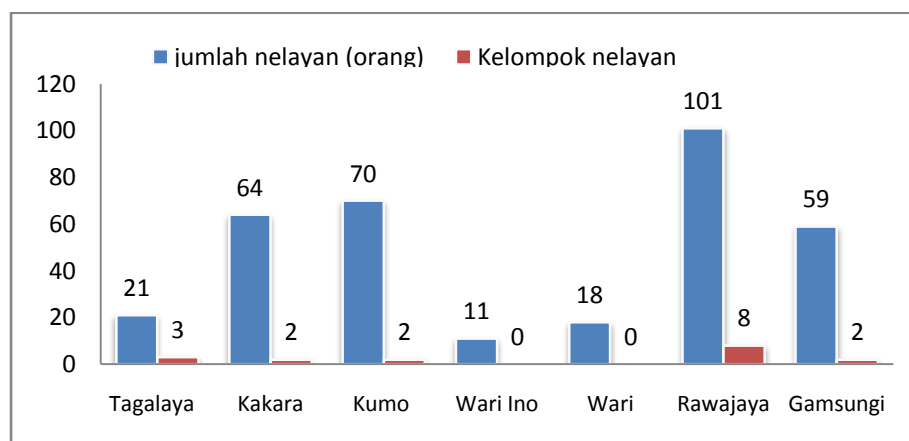
3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Kelembagaan Nelayan Tangkap

Kelompok nelayan merupakan suatu kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis mata pencaharian atau profesi, dalam hal ini adalah sebagai nelayan. Di Kecamatan Tobelo terdapat 17 kelompok nelayan yang tersebar di berbagai desa pesisir, yaitu di Desa Rawajaya, Tagalaya, Kakara dan Desa Kumo (Gambar 2).

Dalam kajian ini dipilih 3 kelompok nelayan yang paling besar secara keorganisasian dan mewakili dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah pulau dan daratan. Ketiga kelompok nelayan dimaksud adalah Kelompok Nustalenta di Desa Rawajaya, Kelompok Karunia dan Imanuel di Desa Kumo.

Setiap kelompok nelayan memiliki identitas atau karakter tersendiri. Identitas tersebut merupakan cerminan kondisi internal dari suatu kelompok. Kondisi internal yang membentuk atau menjadi identitas suatu kelompok nelayan antara lain kondisi lingkungan tempat kelompok nelayan berada, karakteristik keanggotaan, sarana prasarana kelompok dan aturan kelompok yang berlaku.



Gambar 2 Jumlah nelayan dan kelompok nelayan pada beberapa desa di Kecamatan Tobelo, tahun 2007

Berdasarkan observasi lapangan, bahwa keberadaan kelompok-kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo memberikan dampak positif bagi anggota maupun masyarakat serta daerah. Secara umum dapat meningkatkan produktivitas nelayan dalam bidang ekonomi maupun sosial-politik. Berdasarkan hasil FGD diperoleh informasi bahwa ada 8 peran kelembagaan yang diemban oleh kelompok-kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo (Tabel 1).

Tabel 1 Peran kelembagaan nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo

No	Peranan Lembaga	Lembaga		
		Karunia	Nustalenta	Immanuel
1	Wadah Simpan pinjam		√	√
2	Wadah pemasaran	√		√
3	Wadah pendidikan dan pelatihan		√	√
4	Bantuan teknis atau servis peralatan		√	√
5	Jaminan sosial dan keamanan keanggotaan	√	√	√
6	Wadah berpolitik dan hukum			√
7	Arisan anggota	√		√
8	Wadah kegiatan keagamaan		√	

Berdasarkan dokumen dari tiga kelompok tersebut diketahui bahwa Kelompok Imanuel memiliki jumlah anggota paling banyak (44 orang) dibanding kelompok nelayan tangkap yang lain di Kecamatan Tobelo (Tabel 2). Banyaknya jumlah anggota mengindikasikan besarnya peranan lembaga terhadap kebutuhan anggota dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

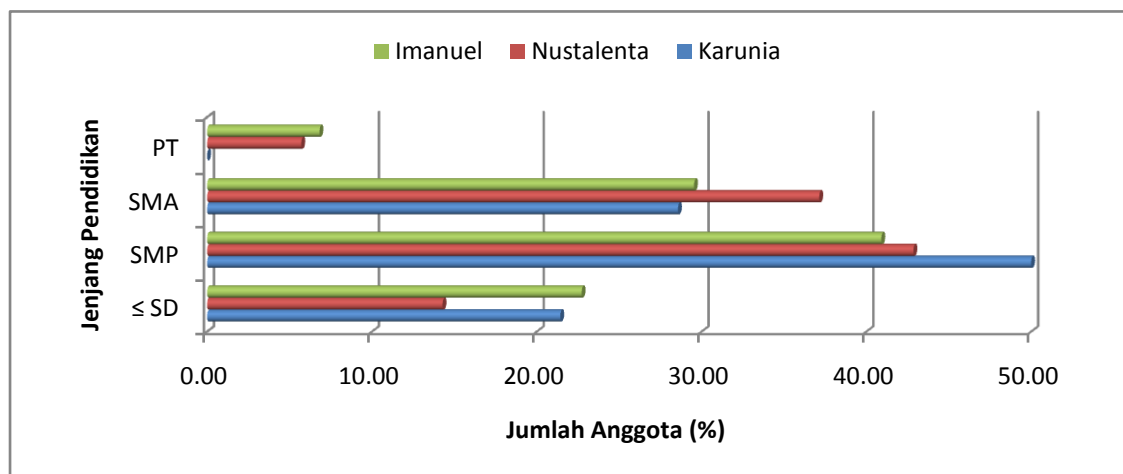
Aktivitas penangkapan ikan merupakan aktivitas yang membutuhkan stamina yang kuat karena kondisi alam tempat kerja (laut) sangat ekstrim dibanding kondisi alam kerja yang lain menyebabkan proses kerja menjadi cukup berat, sehingga pada umumnya masyarakat yang terjun dalam profesi tersebut tergolong usia produktif. Hal ini tercermin dari sebagian besar anggota kelompok nelayan yang ada di kecamatan Tobelo berusia antara 20-50 tahun atau tergolong produktif jika mengacu pada usia kerja secara nasional.

Tabel 2. Umur anggota kelompok nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo

Umur	Kelompok Nelayan Tangkap			Total	
	Karunia	Nustalenta	Immanuel	Jlh	%
20 - 35 th	10	13	17	40	37,73
36 – 50 th	15	18	24	57	53,78
>50 th	2	4	3	9	8,49
Jumlah Anggota (orang)	27	35	44	106	100

Tingkat pendidikan nelayan yang masuk dalam kelompok nelayan, bervariasi dari SD sampai Perguruan tinggi. Sebagian besar anggota kelompok nelayan berpendidikan SMP dan SMA (Gambar 3). Jenjang pendidikan tersebut tergolong cukup tinggi di kalangan nelayan maupun secara umum di masyarakat Indonesia. Sebagian kecil yang berpendidikan SD atau tidak sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya pendidikan cukup tinggi dan tingkat perekonomian nelayan juga tergolong cukup, mengingat pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Jenjang pendidikan perguruan tinggi ditemukan pada ketiga kelompok nelayan walaupun jumlahnya tidak merata. Anggota kelompok nelayan yang memiliki jenjang pendidikan perguruan tinggi terbanyak ditemukan pada Kelompok Nelayan Immanuel dan Nustalenta. Tingkat pendidikan SMA terbanyak ditemukan pada anggota Kelompok Nelayan Nustalenta, sedangkan pendidikan SMP terbanyak ditemukan pada anggota Kelompok Nelayan Karunia.



Gambar 3 Tingkat pendidikan anggota kelompok nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo

3.2 Potensi dan Permasalahan Kelembagaan Nelayan Tangkap

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi dan permasalahan yang bersifat internal lembaga (kekuatan dan kelemahan) yang diperoleh dari proses FGD teridentifikasi ada 6 faktor yang menjadi potensi internal dari lembaga nelayan yang ada, antara lain 1) motivasi dan etos kerja pengurus tinggi; 2) posisi lembaga yang sangat strategis; 3) meningkatnya peranan lembaga; 4) jumlah anggota relatif banyak; 5) umur sebagian besar anggota tergolong umur produktif; 6) alat tangkap nelayan tergolong cukup memadai. Sedangkan permasalahan internal yang menjadi faktor kelemahan lembaga, teridentifikasi ada 10 faktor antara lain 1) masih rendahnya partisipasi anggota; 2) masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan organisasi; 3) kurangnya manajemen lembaga; 4) infrastruktur organisasi kurang memadai; 5) kurangnya komunikasi dengan pemerintah; 6) kurang tegas dalam pemberian sanksi; 7) lembaga belum ada badan hukum; 8) keanggotaan cenderung keluarga; 9) kurangnya dokumentasi dan arsip lembaga dan 10) kurangnya relevansi rencana dengan pelaksanaan.

3.3 Identifikasi Strategi Pengembangan Kelembagaan

Secara garis besar alternatif strategi yang dihasilkan berdasarkan faktor internal kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu aspek sumberdaya manusia (SDM), aspek manajemen dan sarana prasarana lembaga dan aspek regulasi. Strategi aspek SDM meliputi 1) meningkatkan komunikasi

anggota; 2) meningkatkan pemberdayaan anggota; 3) meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus dan 4) membuka kesempatan keanggotaan bagi masyarakat. Strategi aspek dan sarana prasarana kelembagaan meliputi 1) meningkatkan manajemen kelembagaan; 2) memperluas dan mempererat jaringan lembaga; 3) memperluas fungsi dan manfaat lembaga; 4) meningkatkan dokumentasi dan arsip lembaga; 5) membuat program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lembaga; dan 6) meningkatkan sarana prasarana lembaga sesuai dengan kemampuan lembaga. Sedangkan strategi dalam aspek regulasi meliputi 1) meningkatkan kesadaran dan ketegasan sanksi dan 2) membuat badan hukum lembaga. Secara skematis strategi tersebut ditampilkan dalam matrik IFAS, sebagai berikut (Tabel 3):

Tabel 3 Matrik strategi pengembangan kelembagaan nelayan tangkap di Kecamatan Tobelo

		KELEMAHAN										
		Masih rendahnya partisipasi anggota	Pengetahuan dan keterampilan organisasi	Kurangnya manajemen lembaga	Kurangnya infrastruktur organisasi	Kurangnya komunikasi dengan pemerintah	Kurang tegas dalam pemberian sanksi	Lembaga belum ada badan hukum	Keanggotaan cenderung keluarga	Kurangnya dokumentasi dan arsip lembaga	Kurangnya relevansi rencana dengan pelaksanaan	
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	
KEKUATAN	Jumlah anggota banyak	K1	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi anggota • Meningkatkan pemberdayaan anggota. • Meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus • Meningkatkan manajemen kelembagaan • Memperluas dan mempererat jaringan lembaga • Meningkatkan kesadaran dan ketegasan sanksi • Memperluas fungsi dan manfaat lembaga • Membuat badan hukum lembaga • Meningkatkan sarana prasarana lembaga sesuai dengan kemampuan lembaga • Meningkatkan dokumentasi dan arsip lembaga • Membuat program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lembaga • Membuka kesempatan keanggotaan bagi masyarakat 									
	Motivasi dan etos kerja pengurus tinggi	K2										
	Posisi lembaga yang sangat strategis	K3										
	Meningkatnya peranan lembaga	K4										
	Umur sebagian besar anggota tergolong muda	K5										
	Alat tangkap nelayan tergolong cukup memadai	K6										

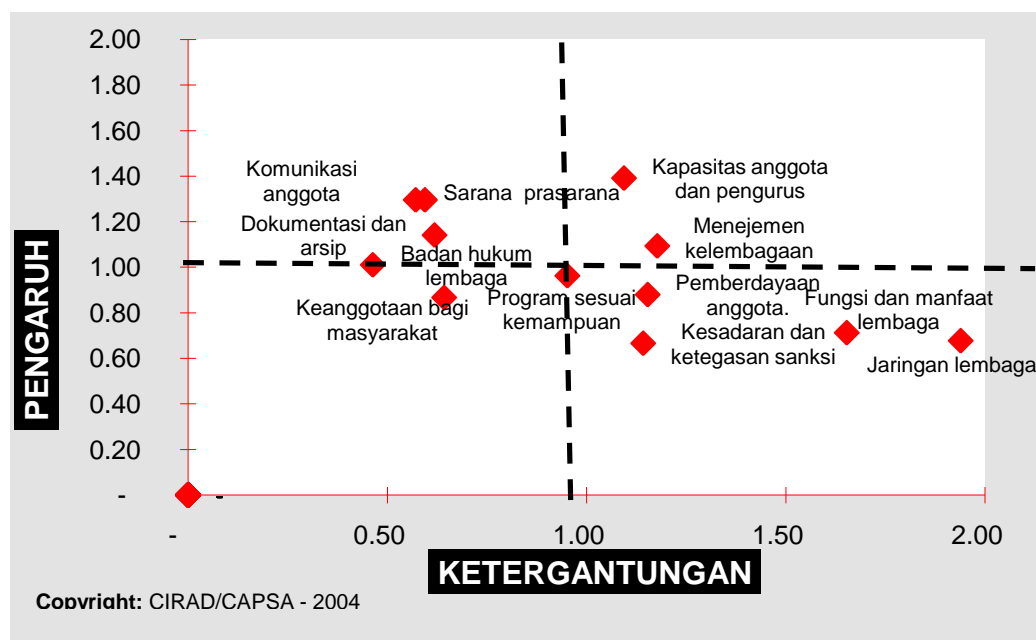
Dalam upaya mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan penentuan prioritas strategi. Salah satu metode untuk menentukan strategi prioritas adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi kelembagaan yang ada, untuk kepentingan tersebut digunakan *prospective participatory analysis* (PPA). Analisis tersebut didasarkan pada pengaruh dan ketergantungan antara strategi-strategi yang akan di pilih. Selain itu analisis tersebut dilakukan secara partisipatif. Strategi-strategi tersebut dipetakan kedalam 4 kuadran, yaitu kuadran strategi penentu, strategi penghubung, strategi bebas, dan strategi terikat. Pada umumnya kuadran yang menjadi prioritas strategi adalah kuadran strategi penentu, karena tingkat pengaruhnya tinggi sedangkan ketergantungannya rendah.

Berdasarkan analisis PPA dapat diketahui bahwa penentu yang dimungkinkan menjadi prioritas strategi, yaitu 1) meningkatkan komunikasi anggota; 2) membuat badan hukum lembaga; 3) meningkatkan dokumentasi dan arsip lembaga; 4) meningkatkan sarana prasarana lembaga sesuai dengan kemampuan lembaga. Sedangkan strategi yang masuk dalam kuadran penghubung, antara lain 1) meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus; dan 2) meningkatkan manajemen kelembagaan. Faktor yang masuk dalam kuadran terikat, antara lain: 1) memperluas fungsi dan manfaat lembaga; 2) meningkatkan pemberdayaan anggota; 3) memperluas dan mempererat jaringan lembaga; 4) meningkatkan kesadaran dan ketegasan sanksi; 5) membuat program sesuai kemampuan dan kebutuhan. Strategi yang masuk ke kuadran bebas, yaitu membuka kesempatan keanggotaan bagi masyarakat.

Metode PPA digunakan untuk penentuan strategi prioritas secara partisipatif yang didasarkan pada pengaruh dan ketergantungan antar strategi. Atas dasar tersebut, maka strategi-strategi alternatif akan dipetakan ke dalam 4 kuadran strategi yaitu 1) kuadran strategi penentu, yaitu strategi yang memiliki pengaruh besar tetapi tingkat ketergantungannya sangat kecil terhadap strategi yang lain, (2) kuadran strategi penghubung, yaitu strategi yang memiliki pengaruh dan ketergantungan yang hampir sama besar terhadap strategi yang lain, (3) kuadran strategi terikat, yaitu strategi yang memiliki pengaruh kecil tetapi tingkat ketergantungannya sangat besar terhadap strategi lain, dan (4) kuadran strategi bebas, yaitu strategi yang memiliki pengaruh dan ketergantungan sama-sama kecil terhadap strategi lain (Bourgeois dan Jesus 1999).

Hasil pemetaan strategi penguatan kelompok nelayan disajikan pada Gambar 4. Strategi yang berada pada kuadran strategi penentu adalah 1) peningkatan komunikasi anggota (0.57,1.30); 2) peningkatan sarana prasarana lembaga sesuai dengan kemampuan lembaga (0.57,1.30); 3) pembuatan badan hukum kelompok dan usaha (0.64,1.14) dan 4) meningkatkan dokumentasi dan publikasi lembaga (0.46,1.01). Strategi pada kuadran strategi penghubung, meliputi 1) peningkatan kapasitas anggota dan pengurus (1.09,1.39); dan 2) peningkatan profesionalisme manajemen lembaga (1.18,1.09). Strategi pada kuadran strategi terikat adalah 1) meningkatkan pemberdayaan anggota (1.15,0.88); 2) peningkatan kesadaran dan ketegasan sanksi (1.14,0.67); 3) perluasan dan memperbanyak fungsi dan usaha lembaga (1.65,0.71); dan 4) perluasan daerah penangkapan, jaringan lembaga dan pasar (1.94,0.68). Strategi pada kuadran strategi bebas, antara lain 1) pembukaan kesempatan keanggotaan bagi masyarakat luas (0.64,0.87); dan 2) pembuatan program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lembaga (1.00,1.00).



Gambar 4 Pemetaan strategi pengembangan kelembagaan nelayan tangkap di kecamatan Tobelo.

3.4 Pembahasan

Sebagian besar armada penangkapan ikan di Kabupaten Halmahera Utara berukuran lebih kecil dari 5 GT atau termasuk armada penangkapan skala kecil (Gambar 4). Dengan demikian, jangkauan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) hanya terkonsentrasi di sekitar perairan pantai (kurang dari 12 mil laut). Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan sebagian besar masih menggunakan teknologi yang sederhana, dimana sebagian besar nelayan menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel serta sebagian kecil menggunakan kapal motor.

Tabel 4 Jenis dan jumlah armada tangkap di Kecamatan Tobelo

No	Desa	Armada Penangkapan (Unit)		
		Perahu tanpa motor	Perahu Motor tempel	Kapal motor
1	Gamsungi	9	15	2
2	Rawajaya	6	15	8
3	Wari	4	7	
4	Wari Ino	5	3	
5	Kumo	5	6	
6	Kakara	30	7	
7	Tagalaya	15	3	
Jumlah		74	56	10

Sumber : DKP Kabupaten Halmahera Utara, 2010

Sarana prasarana penunjang usaha perikanan merupakan salah satu komponen utama penentu keberhasilan pembangunan di sektor perikanan. Secara umum sarana prasarana di Kabupaten Halmahera Utara masih terbatas sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan, baik kapasitas maupun kuantitasnya. Kondisi eksisting sarana dan prasarana yang ada adalah 1 unit Balai Pertemuan Nelayan, 1 unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), 1 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 1 unit ABF, 1 unit perbengkelan motor, 1 unit *docking*, 2 unit pabrik es, dan 1 unit *cold storage*. Selain itu, terdapat beberapa alat bantu penangkapan ikan berupa 42 unit rumpon laut dangkal, 5 unit rumpon laut dalam, dan 15 unit lampu celup bawah air (Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara, 2008).

Sebagai komunitas kelompok masyarakat nelayan, keberadaannya tidak dapat terhindar dari fenomena kemiskinan. Kemiskinan terbentuk dari

ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam membentuk kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang bekerja sebagai nelayan. Kepemilikan alat tangkap menjadi salah satu aspek dari karakteristik masyarakat nelayan di Desa Kumo (pulau Kumo) dan Desa Rawajaya di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

Kemampuan masyarakat desa yang masih tradisional dalam membangun struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh ikatan-ikatan sosial yang asli dan organisasi, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi semata-mata untuk keperluan keluarga, pengekangan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu berorientasi kepada laba (*non profit oriented*). Landasan struktur ekonomi masyarakat desa diletakkan pada prinsip hemat, ingat, dan istirahat (Boeke 1983).

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kecamatan Tobelo di desa pesisir dan pulau-pulau kecil adalah petani dan nelayan. Mereka yang berprofesi sebagai nelayan ada yang melaut secara sendiri-sendiri, dan ada pula yang melaut secara bersama-sama (berkelompok). Mereka yang bersama-sama membentuk kelompok dalam melakukan penangkapan, membagi hasil tangkapan secara adil sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Walaupun sistem bagi hasil ini didasarkan atas peran dan tanggung jawab, namun masyarakat nelayan juga tetap mengedepankan kebersamaan dan budaya gotong royong.

Pendapatan anggota kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo diperoleh melalui bagi hasil antara sesama anggota kelompok nelayan. Model pembagiannya adalah dari total pendapatan melaut dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan setiap kali melaut, kemudian sisanya dibagi sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing. Eko (2003) mengatakan bahwa pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, sebelum dikurangi transfer *payment* (subsidi). Transfer *payment* yaitu pendapatan yang tidak berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang bersangkutan.

Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan asli dan pendapatan turunan (sekunder). Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang. Pendapatan turunan (sekunder)

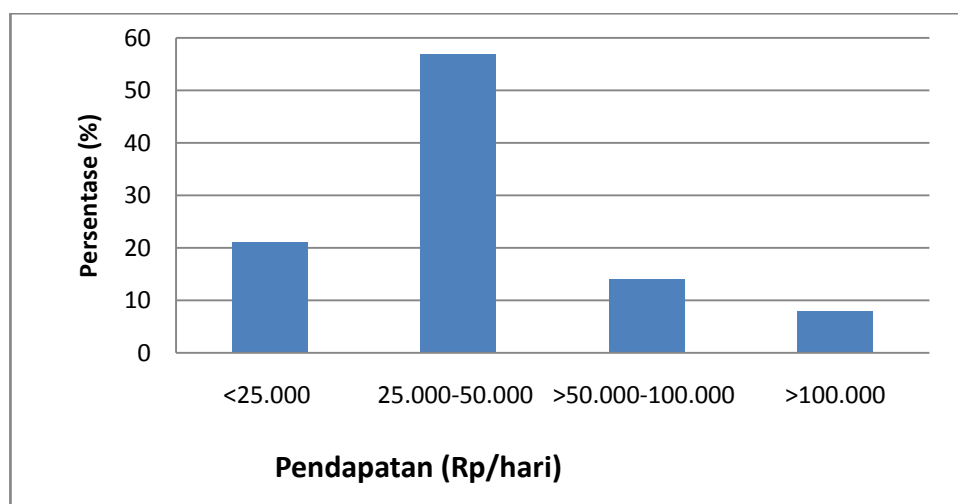
merupakan pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri.

Sumardi dan Evers (1982) membedakan pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan yang berupa uang dan pendapatan yang berupa barang. Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya reguler dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi, sumber utama yaitu:

- 1) Gaji dan upah yang diperoleh dari pekerjaan pokok, kerja sampingan, kerja lemburan, dan kerja kadang-kadang;
- 2) Usaha sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, dan penjualan dari kerajinan rumah;
- 3) Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah;
- 4) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

Pendapatan yang berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Pendapatan ini berupa:

- 1) Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan, dan rekreasi;
- 2) Bagian yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang di tempati.



Gambar 5 Pendapatan anggota kelompok nelayan

Aryani (2005) menyatakan bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu:

- 1) Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*) yaitu pendapatan rata-rata dari Rp. 150.000 per bulan.
- 2) Golongan berpenghasilan sedang (*Moderate income group*) yaitu pendapatan rata-rata Rp. 150.000 – Rp.450.000 per bulan.
- 3) Golongan berpenghasilan menengah (*midle income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 450.000 – Rp. 900.000 per bulan.
- 4) Golongan yang berpenghasilan tinggi (*high income group*) yaitu rata-rata pendapatan lebih dari Rp. 900.000 per bulan.

Sumber modal yang dimiliki oleh kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo berasal dari kelompok nelayan itu sendiri, ditambah dengan modal pinjaman dari juragan, dan modal dari penggawa (buruh nelayan) melalui iuran sukarela para penggawa. Modal tersebut kemudian digabung menjadi satu untuk digunakan sebagai biaya operasional kelompok nelayan.

Kepemilikan modal bagi Kelompok Nelayan Imanuel sebesar 50% berasal dari dalam kelompok sendiri, sedangkan sisanya sebesar 30% berasal dari penggawa (buruh nelayan), dan 20% berasal dari juragan. Kelompok nelayan yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada juragan adalah Kelompok Nelayan Kurnia yaitu sebesar 40% dari total biaya operasional nelayan. Kelompok Nelayan Kurnia memiliki modal yang paling kecil dari ketiga kelompok nelayan lainnya, yaitu hanya 25%, dan sisa kepemilikan modal masih ditopang dari penggawa. Sedangkan kelompok nelayan yang paling rendah tingkat ketergantungannya pada juragan adalah Kelompok Nelayan Nustalenta yaitu hanya 10% dari total modal yang dimiliki.

Kepemilikan modal kelompok nelayan sangat menentukan tingkat pendapatan nelayan dalam kelompok. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki nelayan, maka tingkat kesejahteraannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika sebagian besar modal nelayan masih mengandalkan dari pihak luar, maka tingkat ketergantungannya terhadap orang lain akan semakin tinggi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Jika kelompok nelayan tergantung pada pihak luar secara finansial, maka jumlah

pendapatan kelompok nelayan tersebut juga akan lebih banyak ditentukan oleh pihak luar tersebut. Hal ini menyangkut tingkat bunga dan harga jual hasil tangkapan nelayan.

Basuki dan Amin (1989) menyatakan bahwa nelayan tradisional seringkali dihadapkan pada suatu dilema, bahwa keterikatan finansial mengharuskan mereka meminjam biaya operasional kepada pihak lain walaupun dengan tingkat suku bunga yang tidak lazim agar nelayan dapat beroperasi untuk menghidupi keluarganya. Bahkan harga ikan hasil tangkapan seringkali ditentukan secara sepihak oleh pemberi pinjaman tanpa mengikuti mekanisme pasar. Dalam hal ini, keuntungan tersembunyi (*hidden profit*) yang diperoleh pemberi pinjaman secara signifikan akan mengurangi tingkat pendapatan nelayan.

Kelompok-kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo tidak hanya berperan sebagai nelayan penangkap ikan sebagaimana umumnya nelayan di Indonesia. Kelompok-kelompok nelayan seperti Kelompok nelayan Kurnia, Nustalenta, dan Imanuel juga menyelenggarakan kegiatan arisan keluarga yang dilakukan secara rutin. Kegiatan arisan ini dilakukan oleh ketiga kelompok nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini, nelayan di Kecamatan Tobelo memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dengan kelompok nelayan lainnya di Indonesia. Program-program yang dilakukan oleh kelompok nelayan ini merupakan inisiatif sendiri dari anggota kelompok yang merasa turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesamanya.

Selain menangkap ikan, Kelompok Nelayan Nustalenta dan Imanuel juga melakukan kegiatan pemasaran atau bertindak sebagai pengumpul hasil tangkapan nelayan lainnya (Tabel 5). Sebagai kelompok yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak, membuat beban pekerjaan dalam kelompok didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nelayan. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan anggota kelompok nelayan yang relatif tinggi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Mereka memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam kelompok.

Tabel 5 Peranan kelompok nelayan dalam bidang ekonomi

No	Peranan Lembaga	Lembaga		
		Karunia	Nustalenta	Immanuel
1	Pemasaran/Pengumpul hasil tangkapan		√	√

	Usaha Simpan pinjam			√
	Arisan keluarga	√	√	√
	Arisan Sarana Usaha			√

Orang Tobelo mewarisi tatanan adat yang telah dibentuk semasa petualangan para leluhur untuk mencari pemukiman baru dimana mereka berada di perjalanan sampai dengan menetap dan membentuk komunitas dalam peradaban awal di Ta'aga Lina. Seni budaya orang Tobelo merupakan pancaran ketulusuhan jiwa dan semangat mensyukuri akan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap tanah persadanya. Kebudayaan ini juga masih terdapat dalam kelompok-kelompok masyarakat, tak terkecuali dalam kelompok nelayan.

Dalam kehidupan sosial orang Tobelo telah mengenal sistim kekerabatan, dimana mereka telah membangun O Halu, yaitu rumah untuk ditempati bersama. Karena O Halu sudah tidak dapat lagi menampung kelompok tersebut, maka atas kesepakatan bersama kelompok ini berpisah satu dengan yang lain dan membentuk komunitas baru yang dikenal dengan sebutan O Hoana Lata yang artinya kelompok empat soa, yaitu:

- 1) Hoana Mamulati mendiami hilir sungai yang bermuara di tepian Ta'aga Lina dan berfungsi sebagai O Popareta Ino yang artinya Soa Mamulati mengurus bidang pemerintahan.
- 2) Hoana Lina berdiam di sekeliling pesisir Ta'aga Lina dan berfungsi sebagai O Hoana Magogoana yang artinya Soa Lina mengurus bidang keamanan.
- 3) Hoana Huboto mendiami belantara sekitar Ta'aga Lina dan berfungsi sebagai O Ni'ata Mangale yang artinya Soa Gura Lina dan berfungsi sebagai O'wowango madoya yang artinya Soa huboto mengatur bidang kesejahteraan.
- 4) Hoana Gura menetap di pulau yang berada di tengah Ta'aga Lina dan berfungsi sebagai O Ni'ata Mangale yang artinya Soa Gura mengatur bidang mental spiritual.

Salah satu hak dan kebutuhan dasar manusia adalah keamanan. Adapun hak dasar lainnya menurut Johan Galtung terdiri dari kebutuhan 1) kesejahteraan, 2) kebebasan, dan 3) identitas budaya. Kebutuhan dasar ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu dari kebutuhan dasar manusia tersebut, turut diperankan oleh kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Tobelo, khususnya

keamanan di laut. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi nelayan-nelayan yang notabene mencari kebutuhan hidupnya di laut.

Rasa aman ini bisa berupa rasa aman dari perampokan di laut, atau rasa aman dari ulah nelayan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Kegiatan ini akan sangat merugikan nelayan lain karena habitat ikan akan menjadi hilang, serta terumbu karang tempat ikan berkembang biak menjadi hancur, maka sumber pendapatan nelayan pun otomatis akan menjadi punah. Oleh karena itu, sebagai kelompok nelayan yang peduli terhadap keamanan di laut, mereka turut serta menjaga keamanan di laut.

Besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi kelompok nelayan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menuntut kerja keras dan tanggung jawab bersama pengurus dan anggota kelompok, serta dukungan pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan motivator masyarakat. Dalam upaya penyelesaian permasalahan diperlukan perumusan strategi yang tepat, efektif dan realistis atau sesuai dengan kemampuan kelompok.

Salah satu metode yang sudah banyak dan efektif digunakan adalah metode *strength weakness oportunity threats* (SWOT). Metode SWOT merupakan metode yang efektif, mudah, partisipatif serta komprehensif dalam merumuskan strategi. Metode SWOT menghasilkan suatu strategi yang mengoptimalkan potensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Marimin, 2004). Secara teknis strategi yang dihasilkan merupakan kombinasi faktor internal dengan faktor eksternal, yang telah dievaluasi melalui *internal factor analysis summary* (IFAS) dan *external factor analysis summary* (EFAS).

Armada penangkapan ikan sebagian besar beroperasi di kawasan pesisir, karena ukurannya yang masih kecil (didominasi perahu tanpa motor, dan perahu motor tempel ukuran di bawah 5 GT), sebagian besar alat tangkap yang digunakan tergolong tradisional/ sederhana (pancing ulur, rawai, *mini purse seine*, *gillnet*, huhate, bagan, dan bubu). Oleh karena itu, perluasan daerah penangkapan ikan perlu dilakukan. Simbolon (2008) menyatakan bahwa perluasan daerah penangkapan ikan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mengurangi konflik

perebutan daerah penangkapan ikan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang ada di perairan pesisir.

Potensi SDI di perairan Halmahera Utara yang cukup besar dengan MSY 86.660,6 ton/tahun, dan potensi ini baru dimanfaatkan sekitar 13,3% (DKP Kabupaten, 2008). Berbagai jenis dan kelompok ikan ekonomis tinggi ditemukan di perairan Halmahera Utara, seperti pelagis besar, pelagis kecil, demersal sampai dengan lobster (DKP Propinsi Maluku Utara, 2005). Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan strategi pemberdayaan dalam artian peningkatan kapasitas anggota kelompok nelayan dan peningkatan teknologi alat tangkap.

Pemberdayaan tersebut bisa dilakukan oleh kelompok nelayan itu sendiri maupun atas bantuan pemerintah. Murdiyanto (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian sumberdaya perairan, termasuk ikan yang terkandung di dalamnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo, maka akan terjalin suatu komunikasi koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis dan sinergis antara kelompok nelayan dengan pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dihasilkan 12 strategi yang dibangun berdasarkan faktor internal dan eksternal kelompok nelayan. Dalam implementasinya, sulit melaksanakan semua strategi walaupun strategi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Oleh karena itu diperlukan pemilihan atau penentuan prioritas strategi untuk mendapatkan strategi prioritas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan strategi prioritas adalah *Participatory Prospective Analysis* (PPA).

Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini adalah kelompok nelayan dan mendorong produktivitas nelayan melalui optimalisasi fungsi pelayanan pemerintah (Murdiyanto, 2003). Peningkatan komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun sistem komunikasi yang efektif dan optimal, misalnya mengadakan pertemuan rutin semua kelompok

nelayan dengan pemerintah dan memanfaatkan atau mengoptimalkan manfaat jaringan media sebagai media komunikasi (telpon, internet dan media tulis).

Pembuatan badan hukum kelompok dan usaha nelayan bertujuan untuk meningkatkan peranan dan produktivitas kelompok melalui jaminan legalitas lembaga dan usaha. Hal tersebut akan meningkatkan posisi tawar kelompok nelayan, baik dalam kelembagaan maupun pemasaran. Kelompok nelayan yang memiliki badan hukum akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menyampaikan inspirasi anggotanya terhadap pihak-pihak lain yang relevan. Kelompok nelayan ini juga diharapkan dapat berperan dengan baik sebagai perpanjangan tangan para anggotanya untuk menyampaikan berbagai inspirasi tentang isu-isu pembangunan dan konflik horizontal antar nelayan dalam memperebutkan daerah penangkapan ikan yang sama (Murdiyanto, 2002; Rusmilyansari *et al.*, 2010).

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Peranan kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo tidak hanya sebagai kelompok melaut tapi juga berperan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat nelayan, walaupun baru hanya di tingkat kelompoknya saja. Bidang peranan kelompok nelayan tersebut, antara lain bidang ekonomi, bidang sosial keagamaan, bidang politik keamanan dan bidang pendidikan teknis.
- 2) Kelompok nelayan di Kecamatan Tobelo memiliki 10 potensi dan 15 permasalahan yang merupakan cerminan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi kelompok tersebut. Tingginya motivasi dan etos kerja pengurus kelompok menjadi faktor kekuatan yang paling potensial untuk peningkatan produktivitas kelompok dan didukung oleh banyaknya peluang program pemberdayaan yang berbasis pada kelembagaan. Permasalahan rendahnya pengetahuan dan keterampilan keorganisasian menjadi faktor kelemahan yang berpengaruh besar terhadap keberlanjutan kelompok dan ketidakjelasan aturan

alat tangkap dan kawasan penangkapan menjadi ancaman yang dapat menurunkan gairah dan produktivitas nelayan di Kecamatan Tobelo.

- 3) Strategi penguatan peranan kelompok nelayan yang diprioritaskan di Kecamatan Tobelo adalah peningkatan sistem komunikasi anggota dan pemerintah, peningkatan sarana prasarana kelompok nelayan, pembuatan badan hukum kelompok, dan peningkatan upaya dokumentasi/pengarsipan serta publikasi kelompok.

4.2 Saran

Berdasarkan berbagai keterbatasan yang ditemukan dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka perlu disarankan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Perlu penelitian lanjutan tentang dampak keberadaan kelompok nelayan terhadap perekonomian dan kondisi sosial nelayan.
- 2) Perlu peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan pendekatan proyek yang ditentukan oleh proses administrasi semata tanpa melihat hasil yang dicapai.
- 3) Pemerintah daerah perlu membangun sistem komunikasi antar kelompok masyarakat termasuk kelompok nelayan yang ada di Halmahera Utara, khususnya di Kecamatan Tobelo, sehingga terbangun sebuah hubungan yang harmonis dan sinergis. Dengan demikian, potensi kelompok nelayan dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang dihadapi dapat di minimalisir.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, A. 2005. Pengaruh Ibu Rumah Tangga yang Bekerja di Luar Sektor Pertanian terhadap Pendapatan Keluarga di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Basuki, R, dan E.M. 1989. Biaya dan Penerimaan Payung Oras serta Pemasaran Cumi-cumi di Tanjung Luar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. No. 53: 75-87. Balai Penelitian Perikanan Laut, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Boeke, J.H. 1983. Prapitalisme di Asia. Jakarta, Sinar Harapan.

- Bourgeois, R., F. Jesus. 1999. Participatory Prospective Analysis; Eksploring and Anticipating Challenges with Stakeholder. *CAPSA Monograph No.46*. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. United Nation.
- Departemen Kelautan dan Perikanan [DKP]. 2008. Laporan evaluasi PEMP Indonesia: 6 Tahun PEMP Sebuah Refleksi. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara. 2008. Rencana induk pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Utara. 5:1-21.
- Eko, Haryani. 2003. Pengaruh Pendapatan Keluarga terhadap Besarnya Kebutuhan di Desa Siderejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Semarang.
- Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Marimin. 2004. Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Murdiyanto, B. 2002. Analisis Konflik antara Nelayan Pancing Rawai dan Jaring Kurau di Perairan Bengkalis, Riau. *Buletin PSP Vol XI. No. 2: 56-64*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Bogor.
- Murdiyanto, B. 2003. Menumbuhkan Komitmen dan Kerjasama *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Wilayah Pantura, Jawa Tengah. *Buletin PSP Vol XII. No. 2: 65-79*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Bogor.
- Rusmiyansari, B. Wiryawan, J. Haluan, D. Simbolon. 2010. Konflik perburuan teripang oleh nelayan andon di perairan Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Peranian. Vol 6. No. 3: 167-174*. Fakultas Pertanian, Universitas Achmad Yani Banjarmasin.
- Simbolon, D. 2008. Alokasi unit penangkapan cakalang, menuju usaha perikanan berkelanjutan di perairan Sorong. *Jurnal Mangrove & Pesisir PSPK Univ. Bung Hatta Padang. Vol. VIII No. 1: 13*.
- Sumardi, M., dan H. D. Evers. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali